



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola keuangan desa yang didasarkan atas prinsip efektif, efisien, terarah, dan terkendali memerlukan pedoman berupa standar harga barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, harga, dan satuan dalam satu periode tertentu;
- b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman standar harga dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu ditetapkan suatu pedoman yang memberikan informasi standar harga satuan yang berlaku di semua desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

**Pasal 1**

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan pokok standar harga satuan;
  - b. besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa; dan
  - c. besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan pokok standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

## Pasal 2

Standar harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
  - b. memperhatikan asas efisiensi.
- (2) Pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa yang harganya melebihi Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (3) Dalam menentukan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa melaksanakan survei harga yang dituangkan dalam berita acara dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran survei harga.
- (4) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH  
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KETENTUAN POKOK STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan Staf Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di Desa.
21. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

## BAB II PENGORGANISASIAN

### A. TIM ATAU PANITIA KEGIATAN

Pemerintah Desa dapat membentuk tim atau panitia kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tim atau panitia kegiatan tersebut tidak sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan barang/jasa di desa.

Pembentukan tim atau panitia kegiatan maupun struktur organisasinya dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan rentang koordinasi, skala kegiatan, efektivitas dan efisiensi serta ketersediaan anggaran. Tim atau panitia kegiatan melaksanakan kegiatan dengan ketentuan:

1. Tim atau panitia kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Susunan tim atau panitia kegiatan diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa selaku penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Kepala seksi selaku sekretaris;
  - d. Anggota berasal dari Perangkat Desa/pengurus lembaga/tokoh masyarakat yang terkait; dan
3. Susunan Tim pencarian tanah pengganti diatur sebagai berikut:
  - a. Tim Kabupaten terdiri atas:
    - 1) Penanggung jawab dijabat oleh Bupati;
    - 2) Wakil Penanggung Jawab dijabat oleh Wakil Bupati;
    - 3) Ketua dijabat Sekretaris Daerah;
    - 4) Wakil Ketua dijabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - 5) Sekretaris dijabat Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    - 6) Anggota berjumlah 6 orang.
  - b. Tim Desa terdiri atas:
    - 1) Penanggung jawab dijabat Kepala Desa;
    - 2) Ketua;
    - 3) Wakil Ketua;
    - 4) Sekretaris;
    - 5) Bendahara; dan
    - 6) Anggota berjumlah 6 orang.

Penunjukan keanggotaan dalam Tim Desa sesuai dengan hasil musyawarah desa.
4. Susunan keanggotaan Tim atau panitia kegiatan yang telah diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

### B. HONORARIUM

1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa
  - a. Honorarium Pengelola Keuangan Desa diberikan kepada:
    - 1) Kades selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
    - 2) Sekdes selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
    - 3) Kaur sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
    - 4) Kasi selaku pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
  - b. Honorarium Pengelola Keuangan Desa diberikan setiap bulan.
2. Honorarium Pengelola Aset Desa
  - a. Honorarium Pengelola Aset Desa diberikan kepada:
    - 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa;

- 2) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa;
  - 3) Kaur sebagai petugas/pengurus aset desa
- b. Honorarium Pengelola Aset Desa diberikan setiap bulan.
3. Honorarium tim atau panitia kegiatan  
Honorarium tim atau panitia kegiatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Honorarium tim atau panitia kegiatan diberikan dalam bentuk:
    - 1) honorarium bulanan;
    - 2) honorarium sidang/rapat; atau
    - 3) honorarium paket kegiatan.
  - b. Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya paling singkat 3 (tiga) bulan berturut-turut antara lain kegiatan:
    - 1) pengelolaan aset desa;
    - 2) penyusunan RPJMDesa/RKP Desa/APBDesa;
    - 3) pemilihan kepala desa;
    - 4) pengisian Perangkat Desa;
    - 5) pengisian BPD;
    - 6) penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
    - 7) penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
  - c. Honorarium bulanan atau paket kegiatan diberikan bagi tim atau panitia kegiatan yang melaksanakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender pada bulan berkenaan.
  - d. Honorarium sidang/rapat diberikan kepada:
    - 1) tim atau panitia kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya kurang dari 3 (tiga) bulan; atau
    - 2) penyelenggara kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat.
  - e. Honorarium sidang/rapat tim atau panitia kegiatan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Honorarium narasumber/pembicara/pelatih
  - a. Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat;
  - b. Honorarium narasumber/pembahas diberikan dalam hal penyampaian materi dan pembahasan paling singkat 1 jam pelajaran, apabila durasi waktu dijadwalkan melebihi 1 jam pelajaran, pemberian honorarium narasumber/pembahas diperhitungkan secara proporsional;
  - c. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
  - d. narasumber/pembicara/pelatih berasal dari:
    - 1) luar Pemerintah Desa atau masyarakat; atau
    - 2) Pemerintah Desa sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari masyarakat.
  - e. dalam hal narasumber/pembicara/pelatih tersebut berasal dari Pemerintah Desa, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembicara/pelatih.
5. Honorarium pengadaan barang/jasa
  - a. Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan kepada TPK;
  - b. Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan per orang per paket kegiatan;

- c. Honorarium tenaga ahli pengadaan barang/jasa kegiatan konstruksi untuk penyusunan perencanaan konstruksi (RAB atau gambar teknis) dapat diberikan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai kegiatan; dan
- d. TPK dapat diberikan biaya operasional yang di dalamnya termasuk honorarium sesuai kemampuan keuangan desa paling tinggi 5% (lima persen) dari total plafon kegiatan pengadaan barang/jasa.
- 6. Honorarium sidang BPD
  - a. Honorarium sidang BPD paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - b. Honorarium sidang BPD tidak diberikan dalam pelaksanaan sidang internal BPD.
- 7. Honorarium Operator
  - a. Honorarium Operator dapat diberikan kepada perangkat desa atau petugas yang melaksanakan input data pada aplikasi yang tidak melekat pada tugas pokok dan fungsinya; dan
  - b. Honorarium Operator diberikan setiap bulan sesuai pelaksanaan input aplikasi tersebut.
- 8. Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium bulanan/sidang/rapat/narasumber, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu.
- 9. Pemberian honorarium dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. PERJALANAN DINAS

- 1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2. Perjalanan dinas dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat.
- 3. Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi kecuali biaya angkutan jenazah diberikan secara riil.
- 4. Biaya perjalanan dinas untuk ketua lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat/ketua TPK disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Sekretaris Desa.
- 5. Biaya perjalanan dinas untuk pengurus lembaga kemasyarakatan/TPK selain ketua, atau masyarakat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus.
- 6. Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- 7. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. Uang Harian
 

Uang harian diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perjalanan Dinas (SPD).

    - 1) Perjalanan dinas luar daerah
 

Satuan biaya uang harian perjalanan meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan ke luar wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
    - 2) Perjalanan dinas dalam daerah
      - (a) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP sampai dengan 20 (dua puluh) kilo meter.
      - (b) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP lebih dari 20 (dua puluh) kilo meter.
  - b. Biaya Transport
 

Biaya transportasi dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah printout Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/kwitansi jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 (satu) liter/10 (sepuluh kilo meter) untuk kendaraan roda empat dan 1 (satu) liter/20 (dua puluh) kilo meter untuk kendaraan roda dua.
- 2) Dalam hal tidak tersedia mesin printout/rusak, dapat menggunakan nota pembelian secara manual dicap dan diparaf petugas SPBU.
- 3) Dalam hal SPBU tidak dapat dijangkau dengan mudah, pembelian BBM dapat dilakukan di luar SPBU. Pembelian BBM yang dilakukan di luar SPBU dibuktikan dengan nota pembelian yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan foto pembelian BBM.
- 4) Penggunaan pesawat terbang/kapal memperhatikan efisiensi waktu dan biaya dengan menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi/kapal kelas di bawahnya, kecuali:
  - a) mendampingi Bupati/Wakil Bupati; atau
  - b) tiket tidak tersedia.
- 5) Biaya Taksi perjalanan dinas dalam negeri  
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
  - a) Keberangkatan
    - (1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - (2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  - b) Kepulangan
    - (1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan;
    - (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- 6) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.
- 7) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- 8) Biaya tol dan parkir dalam perjalanan dinas dapat dibayarkan dibuktikan dengan bukti yang sah atau riwayat transaksi penggunaan kartu *e-toll*.
- 9) Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per/orang.
- c. Biaya Penginapan  
Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara *at cost* (sesuai harga yang tertera dalam nota).
  - 2) dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
8. Pelaksanaan perjalanan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) kali uang harian.
- b. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Kepala Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa:
  - 1) surat undangan (jika pelaksana kegiatan bukan desa);
  - 2) surat perintah tugas oleh Kepala Desa atau ketua BPD;
  - 3) laporan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
  - 4) nota/*bill* hotel (jika menginap);
  - 5) nota BBM dan/atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas luar daerah); dan
  - 6) daftar penerimaan perjalanan dinas.
- c. Indeks perjalanan dinas juga berlaku bagi Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).
- d. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/komparasi dilakukan secara selektif dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.
- b. Pelaksana perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah.
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibatalkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APB Desa.
- e. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi:
  - 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Kepala Desa;
  - 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
  - 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Kepala Desa.
- f. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (3) sebagai berikut:
  - 1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

#### D. KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

##### 1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar pemerintah desa atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

##### a. Paket *fullboard*

Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### b. Paket *fullday*

Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *halfday*

Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor  
Uang harian diberikan secara lumpsom berdasarkan indeks masing-masing.
3. Biaya Transportasi Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
Biaya transport dapat diberikan kepada peserta rapat/pertemuan di luar kantor dengan mengacu pada penghitungan BBM transport PP adalah 1 (satu) liter/10 (sepuluh kilo meter) untuk kendaraan roda empat dan 1 (satu) liter/20 (dua puluh) kilo meter untuk kendaraan roda dua.

E. BIAYA KONSUMSI RAPAT

Biaya Konsumsi rapat diberikan untuk biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang melibatkan pihak di luar Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengadaan kudapan rapat biasa dan dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam;
2. pengadaan makan rapat biasa hanya dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan rapat lebih dari 3 (tiga) jam;
3. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 8 (delapan) jam dapat diberikan makan 1 (satu) kali dan kudapan 2 (dua) kali; dan
4. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 12 (dua belas) jam dapat diberikan makan 2 (dua) kali dan kudapan 3 (tiga) kali.

F. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

1. gedung atau bangunan milik desa; dan/atau
2. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pemerintah desa dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pemerintah desa barang untuk melakukan pemeliharaan.

G. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pada keadaan tertentu, biaya pemeliharaan kendaraan dinas dapat digunakan untuk biaya pembersihan mobil ambulans desa.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  
Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

#### H. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pengelola inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal atau beroperasi dengan baik. Biaya pemeliharaan printer tidak termasuk kebutuhan penggantian toner.

#### I. UANG LEMBUR

Pemberian uang lembur dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah melakukan pekerjaan lembur paling sedikit 1 (satu) jam dan maksimal 4 (empat) jam di luar jam kerja.
2. Tugas lembur dilaksanakan atas perintah Kepala Desa secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas di luar jam kerja dan shif yg ditentukan.
3. Lembur minimal 3 (tiga) jam dapat diberikan uang makan 1 kali. Uang makan lembur hanya diberikan maksimal 1 kali dalam sehari.
4. Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200% dari besarnya uang lembur/jam.

#### J. UANG SAKU PERSERTA PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, SOSIALISASI, SEMINAR, WORKSHOP, MUSYAWARAH, DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT

1. Uang saku dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat.
2. Uang saku peserta pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan paling singkat 3 jam.

#### K. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

Bentuk pertanggungjawaban belanja Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

A. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS

1. UANG HARIAN LUAR KOTA

| NO | URAIAN                                 | SATUAN     | HARGA<br>(Rp) |
|----|----------------------------------------|------------|---------------|
| 1  | 2                                      | 3          | 4             |
| 1  | Aceh                                   |            |               |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD              | Orang/Hari | 330.000       |
|    | Sekdes/Anggota BPD                     | Orang/Hari | 320.000       |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat<br>Desa | Orang/Hari | 310.000       |
| 2  | Sumatera Utara                         |            |               |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD              | Orang/Hari | 340.000       |
|    | Sekdes/Anggota BPD                     | Orang/Hari | 330.000       |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat<br>Desa | Orang/Hari | 320.000       |
| 3  | Riau                                   |            |               |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD              | Orang/Hari | 340.000       |
|    | Sekdes/Anggota BPD                     | Orang/Hari | 330.000       |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat<br>Desa | Orang/Hari | 320.000       |
| 4  | Kepulauan Riau                         |            |               |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD              | Orang/Hari | 340.000       |
|    | Sekdes/Anggota BPD                     | Orang/Hari | 330.000       |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat<br>Desa | Orang/Hari | 320.000       |
| 5  | Jambi                                  |            |               |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD              | Orang/Hari | 340.000       |
|    | Sekdes/Anggota BPD                     | Orang/Hari | 330.000       |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat<br>Desa | Orang/Hari | 320.000       |
| 6  | Sumatera Barat                         |            |               |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD              | Orang/Hari | 350.000       |
|    | Sekdes/Anggota BPD                     | Orang/Hari | 340.000       |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat<br>Desa | Orang/Hari | 330.000       |

| 1  | 2                                   | 3          | 4       |
|----|-------------------------------------|------------|---------|
| 7  | Sumatera Selatan                    |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 350.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 330.000 |
| 8  | Lampung                             |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 350.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 330.000 |
| 9  | Bengkulu                            |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 350.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 330.000 |
| 10 | Bangka Belitung                     |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 380.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 370.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 360.000 |
| 11 | Banten                              |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 330.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 320.000 |
| 12 | Jawa Barat                          |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 400.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 390.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 380.000 |
| 13 | DKI Jakarta                         |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 500.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 490.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 480.000 |
| 14 | Jawa Tengah                         |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 330.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 320.000 |

| 1  | 2                                   | 3          | 4       |
|----|-------------------------------------|------------|---------|
| 15 | DI Yogyakarta                       |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 390.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 380.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 370.000 |
| 16 | Jawa Timur                          |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 380.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 370.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 360.000 |
| 17 | Bali                                |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 450.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 440.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 430.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat                 |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 410.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 400.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 390.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur                 |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 400.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 390.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 380.000 |
| 20 | Kalimantan Barat                    |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 350.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 330.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah                   |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 330.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 320.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 310.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan                  |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 350.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 330.000 |

| 1  | 2                                   | 3          | 4       |
|----|-------------------------------------|------------|---------|
| 23 | Kalimantan Timur                    |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 400.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 390.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 380.000 |
| 24 | Kalimantan Utara                    |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 400.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 390.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 380.000 |
| 25 | Sulawesi Utara                      |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 330.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 320.000 |
| 26 | Gorontalo                           |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 330.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 320.000 |
| 27 | Sulawesi Barat                      |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 380.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 370.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 360.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan                    |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 400.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 390.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 380.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah                     |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 330.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 320.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara                   |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 330.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 320.000 |

| 1  | 2                                   | 3          | 4       |
|----|-------------------------------------|------------|---------|
| 31 | Maluku                              |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 350.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 340.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 330.000 |
| 32 | Maluku Utara                        |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 400.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 390.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 380.000 |
| 33 | Papua                               |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 550.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 540.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 530.000 |
| 34 | Papua Barat                         |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 450.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 440.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 430.000 |
| 35 | Papua Barat Daya                    |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 450.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 440.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 430.000 |
| 36 | Papua Tengah                        |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 550.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 540.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 530.000 |
| 37 | Papua Selatan                       |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 550.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 540.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 530.000 |
| 38 | Papua Pegunungan                    |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 550.000 |
|    | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 540.000 |
|    | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 530.000 |

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP SAMPAI DENGAN 20 KM

| NO | URAIAN                              | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                   | 3          | 4          |
| 1  | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 50.000     |
| 2  | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 45.000     |
| 3  | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 40.000     |

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP LEBIH DARI 20 KM

| NO | URAIAN                              | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                   | 3          | 4          |
| 1  | Kepala Desa/ Pimpinan BPD           | Orang/Hari | 75.000     |
| 2  | Sekdes/Anggota BPD                  | Orang/Hari | 60.000     |
| 3  | Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 50.000     |

4. BIAYA TAKSI

| NO | URAIAN              | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1  | 2                   | 3          | 4          |
| 1  | Aceh                | Orang/Kali | 127.000    |
| 2  | Sumatera Utara      | Orang/Kali | 308.000    |
| 3  | Riau                | Orang/Kali | 101.000    |
| 4  | Kepulauan Riau      | Orang/Kali | 165.000    |
| 5  | Jambi               | Orang/Kali | 147.000    |
| 6  | Sumatera Barat      | Orang/Kali | 190.000    |
| 7  | Sumatera Selatan    | Orang/Kali | 179.000    |
| 8  | Lampung             | Orang/Kali | 168.000    |
| 9  | Bengkulu            | Orang/Kali | 109.000    |
| 10 | Bangka Belitung     | Orang/Kali | 97.000     |
| 11 | Banten              | Orang/Kali | 536.000    |
| 12 | Jawa Barat          | Orang/Kali | 200.000    |
| 13 | Jakarta             | Orang/Kali | 256.000    |
| 14 | Jawa Tengah         | Orang/Kali | 108.000    |
| 15 | Yogyakarta          | Orang/Kali | 267.000    |
| 16 | Jawa Timur          | Orang/Kali | 233.000    |
| 17 | Bali                | Orang/Kali | 227.000    |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali | 231.000    |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali | 116.000    |
| 20 | Kalimantan Barat    | Orang/Kali | 171.000    |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Orang/Kali | 134.000    |

| 1  | 2                  | 3          | 4       |
|----|--------------------|------------|---------|
| 22 | Kalimantan Selatan | Orang/Kali | 180.000 |
| 23 | Kalimantan Timur   | Orang/Kali | 533.000 |
| 24 | Kalimantan Utara   | Orang/Kali | 218.000 |
| 25 | Sulawesi Utara     | Orang/Kali | 138.000 |
| 26 | Gorontalo          | Orang/Kali | 265.000 |
| 27 | Sulawesi Barat     | Orang/Kali | 313.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan   | Orang/Kali | 187.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah    | Orang/Kali | 165.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara  | Orang/Kali | 171.000 |
| 31 | Maluku             | Orang/Kali | 288.000 |
| 32 | Maluku Utara       | Orang/Kali | 215.000 |
| 33 | Papua              | Orang/Kali | 513.000 |
| 34 | Papua Barat        | Orang/Kali | 236.000 |
| 35 | Papua Barat Daya   | Orang/Kali | 236.000 |
| 36 | Papua Tengah       | Orang/Kali | 513.000 |
| 37 | Papua Selatan      | Orang/Kali | 513.000 |
| 38 | Papua Pegunungan   | Orang/Kali | 513.000 |

5. BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA

| NO | URAIAN              | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1  | 2                   | 3          | 4          |
| 1  | Aceh                | Orang/Hari | 770.000    |
| 2  | Sumatera Utara      | Orang/Hari | 699.000    |
| 3  | Riau                | Orang/Hari | 852.000    |
| 4  | Kepulauan Riau      | Orang/Hari | 792.000    |
| 5  | Jambi               | Orang/Hari | 580.000    |
| 6  | Sumatera Barat      | Orang/Hari | 701.000    |
| 7  | Sumatera Selatan    | Orang/Hari | 861.000    |
| 8  | Lampung             | Orang/Hari | 580.000    |
| 9  | Bengkulu            | Orang/Hari | 692.000    |
| 10 | Bangka Belitung     | Orang/Hari | 649.000    |
| 11 | Banten              | Orang/Hari | 724.000    |
| 12 | Jawa Barat          | Orang/Hari | 686.000    |
| 13 | DKI Jakarta         | Orang/Hari | 730.000    |
| 14 | Jawa Tengah         | Orang/Hari | 750.000    |
| 15 | DI Yogyakarta       | Orang/Hari | 845.000    |
| 16 | Jawa Timur          | Orang/Hari | 814.000    |
| 17 | Bali                | Orang/Hari | 1.138.000  |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/Hari | 907.000    |

| 1  | 2                   | 3          | 4         |
|----|---------------------|------------|-----------|
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/Hari | 688.000   |
| 20 | Kalimantan Barat    | Orang/Hari | 538.000   |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Orang/Hari | 659.000   |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Orang/Hari | 697.000   |
| 23 | Kalimantan Timur    | Orang/Hari | 804.000   |
| 24 | Kalimantan Utara    | Orang/Hari | 904.000   |
| 25 | Sulawesi Utara      | Orang/Hari | 978.000   |
| 26 | Gorontalo           | Orang/Hari | 955.000   |
| 27 | Sulawesi Barat      | Orang/Hari | 704.000   |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Orang/Hari | 745.000   |
| 29 | Sulawesi Tengah     | Orang/Hari | 951.000   |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Orang/Hari | 786.000   |
| 31 | Maluku              | Orang/Hari | 667.000   |
| 32 | Maluku Utara        | Orang/Hari | 605.000   |
| 33 | Papua               | Orang/Hari | 1.038.000 |
| 34 | Papua Barat         | Orang/Hari | 967.000   |
| 35 | Papua Barat Daya    | Orang/Hari | 967.000   |
| 36 | Papua Tengah        | Orang/Hari | 1.038.000 |
| 37 | Papua Selatan       | Orang/Hari | 1.526.000 |
| 38 | Papua Pegunungan    | Orang/Hari | 1.536.000 |

6. BIAAYA TIKET KENDARAAN UMUM

| NO | URAIAN                      | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|-----------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                           | 3          | 4          |
| 1  | Tiket Kereta Api            | Orang/Kali | 700.000    |
| 2  | Tiket Bus/travel/sejenisnya | Orang/Kali | 500.000    |

7. BIAAYA TIKET PESAWAT TERBANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

| NO | URAIAN                              | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                   | 3          | 4          |
| 1  | Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis        | Orang/Kali | 4.107.000  |
| 2  | Jakarta Ke Yogyakarta-Ekonomi       | Orang/Kali | 2.268.000  |
| 3  | Balikpapan Ke Yogyakarta-Bisnis     | Orang/Kali | 9.669.000  |
| 4  | Balikpapan Ke Yogyakarta-Ekonomi    | Orang/Kali | 4.749.000  |
| 5  | Banda Aceh Ke Yogyakarta-Bisnis     | Orang/Kali | 9.765.000  |
| 6  | Banda Aceh Ke Yogyakarta-Ekonomi    | Orang/Kali | 5.380.000  |
| 7  | Bandar Lampung Ke Yogyakarta-Bisnis | Orang/Kali | 5.155.000  |

| 1  | 2                                    | 3          | 4          |
|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 8  | Bandar Lampung Ke Yogyakarta-Ekonomi | Orang/Kali | 2.760.000  |
| 9  | Bandung Ke Yogyakarta-Bisnis         | Orang/Kali | 3.369.000  |
| 10 | Bandung Ke Yogyakarta-Ekonomi        | Orang/Kali | 2.129.000  |
| 11 | Banjarmasin Ke Yogyakarta-Bisnis     | Orang/Kali | 7.723.000  |
| 12 | Banjarmasin Ke Yogyakarta-Ekonomi    | Orang/Kali | 4.022.000  |
| 13 | Batam Ke Yogyakarta-Bisnis           | Orang/Kali | 7.370.000  |
| 14 | Batam Ke Yogyakarta-Ekonomi          | Orang/Kali | 3.936.000  |
| 15 | Biak Ke Yogyakarta-Bisnis            | Orang/Kali | 15.648.000 |
| 16 | Biak Ke Yogyakarta-Ekonomi           | Orang/Kali | 8.108.000  |
| 17 | Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis         | Orang/Kali | 6.653.000  |
| 18 | Jambi Ke Yogyakarta-Ekonomi          | Orang/Kali | 3.551.000  |
| 19 | Jayapura Ke Yogyakarta-Bisnis        | Orang/Kali | 13.274.000 |
| 20 | Jayapura Ke Yogyakarta-Ekonomi       | Orang/Kali | 7.690.000  |
| 21 | Yogyakarta Ke Denpasar-Bisnis        | Orang/Kali | 3.861.000  |
| 22 | Yogyakarta Ke Denpasar-Ekonomi       | Orang/Kali | 2.481.000  |
| 23 | Yogyakarta Ke Makassar-Bisnis        | Orang/Kali | 6.525.000  |
| 24 | Yogyakarta Ke Makassar-Ekonomi       | Orang/Kali | 3.893.000  |
| 25 | Yogyakarta Ke Manado-Bisnis          | Orang/Kali | 10.536.000 |
| 26 | Yogyakarta Ke Manado-Ekonomi         | Orang/Kali | 5.722.000  |
| 27 | Yogyakarta Ke Medan-Bisnis           | Orang/Kali | 9.519.000  |
| 28 | Yogyakarta Ke Medan-Ekonomi          | Orang/Kali | 4.770.000  |
| 29 | Yogyakarta Ke Padang-Bisnis          | Orang/Kali | 7.969.000  |
| 30 | Yogyakarta Ke Padang-Ekonomi         | Orang/Kali | 4.000.000  |
| 31 | Yogyakarta Ke Palembang-Bisnis       | Orang/Kali | 6.460.000  |
| 32 | Yogyakarta Ke Palembang-Ekonomi      | Orang/Kali | 3.380.000  |
| 33 | Yogyakarta Ke Pekanbaru-Bisnis       | Orang/Kali | 8.022.000  |
| 34 | Yogyakarta Ke Pekanbaru-Ekonomi      | Orang/Kali | 4.054.000  |
| 35 | Yogyakarta Ke Pontianak-Bisnis       | Orang/Kali | 6.910.000  |
| 36 | Yogyakarta Ke Pontianak-Ekonomi      | Orang/Kali | 3.840.000  |
| 37 | Yogyakarta Ke Timika-Bisnis          | Orang/Kali | 11.894.000 |
| 38 | Yogyakarta Ke Timika-Ekonomi         | Orang/Kali | 7.038.000  |
| 39 | Kendari Ke Yogyakarta-Bisnis         | Orang/Kali | 8.129.000  |
| 40 | Kendari Ke Yogyakarta-Ekonomi        | Orang/Kali | 4.706.000  |
| 41 | Kupang Ke Yogyakarta-Bisnis          | Orang/Kali | 7.348.000  |
| 42 | Kupang Ke Yogyakarta-Ekonomi         | Orang/Kali | 4.182.000  |
| 43 | Mataram Ke Yogyakarta-Bisnis         | Orang/Kali | 4.417.000  |
| 44 | Mataram Ke Yogyakarta-Ekonomi        | Orang/Kali | 2.781.000  |

|    |                                      |            |           |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|
| 45 | Palangkaraya Ke Yogyakarta-Bisnis    | Orang/Kali | 7.477.000 |
| 46 | Palangkaraya Ke Yogyakarta-Ekonomi   | Orang/Kali | 4.022.000 |
| 47 | Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Bisnis  | Orang/Kali | 6.065.000 |
| 48 | Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Ekonomi | Orang/Kali | 3.262.000 |

8. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK *FULLBOARD*

| NO | URAIAN              | SATUAN      | HARGA (Rp) |
|----|---------------------|-------------|------------|
| 1  | 2                   | 3           | 4          |
| 1  | Aceh                | Orang/Paket | 752.500    |
| 2  | Sumatera Utara      | Orang/Paket | 752.500    |
| 3  | Riau                | Orang/Paket | 591.250    |
| 4  | Kepulauan Riau      | Orang/Paket | 623.500    |
| 5  | Jambi               | Orang/Paket | 860.000    |
| 6  | Sumatera Barat      | Orang/Paket | 688.000    |
| 7  | Sumatera Selatan    | Orang/Paket | 752.500    |
| 8  | Lampung             | Orang/Paket | 645.000    |
| 9  | Bengkulu            | Orang/Paket | 913.750    |
| 10 | Bangka Belitung     | Orang/Paket | 806.250    |
| 11 | Banten              | Orang/Paket | 860.000    |
| 12 | Jawa Barat          | Orang/Paket | 806.250    |
| 13 | DKI Jakarta         | Orang/Paket | 967.500    |
| 14 | Jawa Tengah         | Orang/Paket | 645.000    |
| 15 | DI Yogyakarta       | Orang/Paket | 752.500    |
| 16 | Jawa Timur          | Orang/Paket | 1.236.250  |
| 17 | Bali                | Orang/Paket | 1.021.250  |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/Paket | 752.500    |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/Paket | 752.500    |
| 20 | Kalimantan Barat    | Orang/Paket | 645.000    |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Orang/Paket | 967.500    |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Orang/Paket | 752.500    |
| 23 | Kalimantan Timur    | Orang/Paket | 752.500    |
| 24 | Kalimantan Utara    | Orang/Paket | 752.500    |
| 25 | Sulawesi Utara      | Orang/Paket | 752.500    |
| 26 | Gorontalo           | Orang/Paket | 1.290.000  |
| 27 | Sulawesi Barat      | Orang/Paket | 752.500    |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Orang/Paket | 1.075.000  |
| 29 | Sulawesi Tengah     | Orang/Paket | 752.500    |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Orang/Paket | 645.000    |

|    |                  |             |           |
|----|------------------|-------------|-----------|
| 31 | Maluku           | Orang/Paket | 752.500   |
| 32 | Maluku Utara     | Orang/Paket | 645.000   |
| 33 | Papua            | Orang/Paket | 967.500   |
| 34 | Papua Barat      | Orang/Paket | 1.075.000 |
| 35 | Papua Barat Daya | Orang/Paket | 1.075.000 |
| 36 | Papua Tengah     | Orang/Paket | 1.075.000 |
| 37 | Papua Selatan    | Orang/Paket | 1.075.000 |
| 38 | Papua Pegunungan | Orang/Paket | 1.075.000 |

9. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
*FULLBOARD* DI LUAR KOTA

| NO | URAIAN                                                        | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                                             | 3          | 4          |
| 1  | Aceh                                                          |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 80.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 70.000     |
| 2  | Sumatera Utara                                                |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000     |
| 3  | Riau                                                          |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000     |
| 4  | Kepulauan Riau                                                |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000     |
| 5  | Jambi                                                         |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000     |
| 6  | Sumatera Barat                                                |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 80.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 70.000     |
| 7  | Sumatera Selatan                                              |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 80.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 70.000     |

| 1  | 2                                                             | 3          | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 8  | Lampung                                                       |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000  |
| 9  | Bengkulu                                                      |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000  |
| 10 | Bangka Belitung                                               |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000  |
| 11 | Banten                                                        |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 80.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 70.000  |
| 12 | Jawa Barat                                                    |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 110.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 100.000 |
| 13 | DKI Jakarta                                                   |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 140.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 130.000 |
| 14 | Jawa Tengah                                                   |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000  |
| 15 | DI Yogyakarta                                                 |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 100.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 90.000  |
| 16 | Jawa Timur                                                    |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 100.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 90.000  |
| 17 | Bali                                                          |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 120.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 110.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat                                           |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 110.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 100.000 |

| 1  | 2                                                              | 3          | 4       |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 19 | Nusa Tenggara Timur                                            |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 100.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 90.000  |
| 20 | Kalimantan Barat                                               |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/ Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000  |
| 21 | Kalimantan Tengah                                              |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 80.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 70.000  |
| 22 | Kalimantan Selatan                                             |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 80.000  |
| 23 | Kalimantan Timur                                               |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 110.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 100.000 |
| 24 | Kalimantan Utara                                               |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 110.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 100.000 |
| 25 | Sulawesi Utara                                                 |            |         |
|    | Kepala Desa/ Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 80.000  |
| 26 | Gorontalo                                                      |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 80.000  |
| 27 | Sulawesi Barat                                                 |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 80.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 70.000  |
| 28 | Sulawesi Selatan                                               |            |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                       | Orang/Hari | 110.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa  | Orang/Hari | 100.000 |

| 1  | 2                                                             | 3           | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 29 | Sulawesi Tengah                                               |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari  | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari  | 80.000  |
| 30 | Sulawesi Tenggara                                             |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari  | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari  | 80.000  |
| 31 | Maluku                                                        |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari  | 80.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari  | 70.000  |
| 32 | Maluku Utara                                                  |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari  | 90.000  |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari  | 80.000  |
| 33 | Papua                                                         |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari  | 160.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari  | 150.000 |
| 34 | Papua Barat                                                   |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari  | 120.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari  | 110.000 |
| 35 | Papua Barat Daya                                              |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Paket | 120.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Paket | 110.000 |
| 36 | Papua Tengah                                                  |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Paket | 160.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Paket | 150.000 |
| 37 | Papua Selatan                                                 |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Paket | 160.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Paket | 150.000 |
| 38 | Papua Pegunungan                                              |             |         |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Paket | 160.000 |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Paket | 150.000 |

10. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK  
FULLDAY

| NO | URAIAN              | SATUAN      | HARGA (Rp) |
|----|---------------------|-------------|------------|
| 1  | 2                   | 3           | 4          |
| 1  | Aceh                | Orang/Paket | 275.000    |
| 2  | Sumatera Utara      | Orang/Paket | 250.000    |
| 3  | Riau                | Orang/Paket | 220.000    |
| 4  | Kepulauan Riau      | Orang/Paket | 255.000    |
| 5  | Jambi               | Orang/Paket | 270.000    |
| 6  | Sumatera Barat      | Orang/Paket | 200.000    |
| 7  | Sumatera Selatan    | Orang/Paket | 265.000    |
| 8  | Lampung             | Orang/Paket | 180.000    |
| 9  | Bengkulu            | Orang/Paket | 250.000    |
| 10 | Bangka Belitung     | Orang/Paket | 360.000    |
| 11 | Banten              | Orang/Paket | 275.000    |
| 12 | Jawa Barat          | Orang/Paket | 300.000    |
| 13 | DKI Jakarta         | Orang/Paket | 375.000    |
| 14 | Jawa Tengah         | Orang/Paket | 240.000    |
| 15 | DI Yogyakarta       | Orang/Paket | 285.000    |
| 16 | Jawa Timur          | Orang/Paket | 300.000    |
| 17 | Bali                | Orang/Paket | 375.000    |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/Paket | 375.000    |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/Paket | 325.000    |
| 20 | Kalimantan Barat    | Orang/Paket | 275.000    |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Orang/Paket | 275.000    |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Orang/Paket | 250.000    |
| 23 | Kalimantan Timur    | Orang/Paket | 280.000    |
| 24 | Kalimantan Utara    | Orang/Paket | 280.000    |
| 25 | Sulawesi Utara      | Orang/Paket | 250.000    |
| 26 | Gorontalo           | Orang/Paket | 175.000    |
| 27 | Sulawesi Barat      | Orang/Paket | 280.000    |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Orang/Paket | 280.000    |
| 29 | Sulawesi Tengah     | Orang/Paket | 360.000    |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Orang/Paket | 260.000    |
| 31 | Maluku              | Orang/Paket | 275.000    |
| 32 | Maluku Utara        | Orang/Paket | 275.000    |
| 33 | Papua               | Orang/Paket | 400.000    |
| 34 | Papua Barat         | Orang/Paket | 350.000    |
| 35 | Papua Barat Daya    | Orang/Paket | 350.000    |
| 36 | Papua Tengah        | Orang/Paket | 400.000    |

|    |                  |             |         |
|----|------------------|-------------|---------|
| 1  | 2                | 3           | 4       |
| 37 | Papua Selatan    | Orang/Paket | 400.000 |
| 38 | Papua Pegunungan | Orang/Paket | 400.000 |

11. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK  
HALFDAY

| NO | URAIAN              | SATUAN      | HARGA (Rp) |
|----|---------------------|-------------|------------|
| 1  | 2                   | 3           | 4          |
| 1  | Aceh                | Orang/Paket | 268.750    |
| 2  | Sumatera Utara      | Orang/Paket | 161.250    |
| 3  | Riau                | Orang/Paket | 172.000    |
| 4  | Kepulauan Riau      | Orang/Paket | 236.500    |
| 5  | Jambi               | Orang/Paket | 193.500    |
| 6  | Sumatera Barat      | Orang/Paket | 161.250    |
| 7  | Sumatera Selatan    | Orang/Paket | 192.425    |
| 8  | Lampung             | Orang/Paket | 204.250    |
| 9  | Bengkulu            | Orang/Paket | 215.000    |
| 10 | Bangka Belitung     | Orang/Paket | 295.625    |
| 11 | Banten              | Orang/Paket | 268.750    |
| 12 | Jawa Barat          | Orang/Paket | 322.500    |
| 13 | DKI Jakarta         | Orang/Paket | 322.500    |
| 14 | Jawa Tengah         | Orang/Paket | 193.500    |
| 15 | DI Yogyakarta       | Orang/Paket | 204.250    |
| 16 | Jawa Timur          | Orang/Paket | 322.500    |
| 17 | Bali                | Orang/Paket | 322.500    |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/Paket | 290.250    |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/Paket | 279.500    |
| 20 | Kalimantan Barat    | Orang/Paket | 258.000    |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Orang/Paket | 252.625    |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Orang/Paket | 198.875    |
| 23 | Kalimantan Timur    | Orang/Paket | 188.125    |
| 24 | Kalimantan Utara    | Orang/Paket | 188.125    |
| 25 | Sulawesi Utara      | Orang/Paket | 188.125    |
| 26 | Gorontalo           | Orang/Paket | 177.375    |
| 27 | Sulawesi Barat      | Orang/Paket | 247.250    |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Orang/Paket | 204.250    |
| 29 | Sulawesi Tengah     | Orang/Paket | 241.875    |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Orang/Paket | 198.875    |
| 31 | Maluku              | Orang/Paket | 241.875    |
| 32 | Maluku Utara        | Orang/Paket | 161.250    |

| 1  | 2                | 3           | 4       |
|----|------------------|-------------|---------|
| 33 | Papua            | Orang/Paket | 263.375 |
| 34 | Papua Barat      | Orang/Paket | 295.625 |
| 35 | Papua Barat Daya | Orang/Paket | 295.625 |
| 36 | Papua Tengah     | Orang/Paket | 295.625 |
| 37 | Papua Selatan    | Orang/Paket | 295.625 |
| 38 | Papua Pegunungan | Orang/Paket | 295.625 |

12. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
*FULLBOARD* DI DALAM KOTA

| NO | URAIAN                                                       | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                                            | 3          | 4          |
| 1  | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                     | Orang/Hari | 90.000     |
| 2  | Sekretaris Desa/Anggota BPD<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 80.000     |

13. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
*FULLDAY/HALFDAY* DALAM KOTA

| NO | URAIAN                                                        | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                                             | 3          | 4          |
| 1  | Jawa Tengah                                                   |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 65.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 55.000     |
| 2  | DI Yogyakarta                                                 |            |            |
|    | Kepala Desa/Pimpinan BPD                                      | Orang/Hari | 70.000     |
|    | Sekretaris Desa/Anggota BPD,<br>Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Hari | 60.000     |

B. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM

| NO | URAIAN                               | SATUAN      | HARGA (Rp) |
|----|--------------------------------------|-------------|------------|
| 1  | 2                                    | 3           | 4          |
| 1  | Honorarium Tim atau Panitia Kegiatan |             |            |
|    | a. Honorarium bulanan:               |             |            |
|    | 1) Penanggung Jawab atau Pembina     | Orang/Bulan | 250.000    |
|    | 2) Ketua                             | Orang/Bulan | 200.000    |
|    | 3) Sekretaris                        | Orang/Bulan | 175.000    |
|    | 4) Anggota                           | Orang/Bulan | 150.000    |
|    | b. Honorarium sidang/rapat:          |             |            |
|    | 1) Penanggung Jawab atau Pembina     | Orang/Bulan | 50.000     |
|    | 2) Ketua                             | Orang/Bulan | 40.000     |
|    | 3) Sekretaris                        | Orang/Bulan | 35.000     |
|    | 4) Anggota                           | Orang/Bulan | 30.000     |

| 1 | 2                                                             | 3             | 4         |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 2 | Honorarium Pengelola Keuangan Desa                            |               |           |
|   | a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa) | Orang/Bulan   | 250.000   |
|   | b. Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)                         | Orang/Bulan   | 225.000   |
|   | c. Pelaksana Kegiatan Anggaran/Bendahara Desa                 | Orang/Bulan   | 200.000   |
| 3 | Honor sidang/Rapat BPD                                        |               |           |
|   | a. Ketua                                                      | Orang/Kali    | 50.000    |
|   | b. Wakil Ketua                                                | Orang/Kali    | 45.000    |
|   | c. Sekretaris                                                 | Orang/Kali    | 35.000    |
|   | d. Anggota                                                    | Orang/Kali    | 30.000    |
| 4 | Honorarium Narasumber/Pembicara/Pelatih                       |               |           |
|   | a. level Nasional/Narasumber profesional                      | Jam/Pelajaran | 1.700.000 |
|   | b. level Provinsi                                             | Jam/Pelajaran | 1.500.000 |
|   | c. level Kabupaten                                            |               |           |
|   | 1) Bupati/Forkopimda                                          | Jam/Pelajaran | 1.400.000 |
|   | 2) Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD                              | Jam/Pelajaran | 1.250.000 |
|   | 3) Eselon II/Anggota DPRD                                     | Jam/Pelajaran | 1.000.000 |
|   | 4) Eselon III/Disetarakan/Forkopimcam                         | Jam/Pelajaran | 900.000   |
|   | 5) Eselon IV/Disetarakan                                      | Jam/Pelajaran | 850.000   |
|   | 6) Golongan III/Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat           | Jam/Pelajaran | 800.000   |
|   | 7) Golongan II/Pendamping Desa                                | Jam/Pelajaran | 750.000   |
|   | d. level desa                                                 |               |           |
|   | 1) Kepala Desa/Pendamping Lokal Desa                          | Jam/Pelajaran | 500.000   |
|   | 2) Sekretaris Desa \BPD/Tokoh masyarakat                      | Jam/Pelajaran | 300.000   |
|   | 3) Kasi/Kaur/Kadus                                            | Jam/Pelajaran | 200.000   |
| 5 | Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa                     |               |           |
|   | a. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi            |               |           |
|   | 1) Nilai Rp5 juta s.d 50 juta:                                |               |           |
|   | a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)                               |               |           |
|   | (1) Ketua                                                     | Orang/Paket   | 250.000   |
|   | (2) Sekretaris                                                | Orang/Paket   | 225.000   |
|   | (3) Anggota                                                   | Orang/Paket   | 200.000   |
|   | b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber                              | Orang/Paket   | 300.000   |
|   | 2) Nilai Rp50 juta s.d 100 juta:                              |               |           |
|   | a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)                               |               |           |
|   | (1) Ketua                                                     | Orang/Paket   | 400.000   |
|   | (2) Sekretaris                                                | Orang/Paket   | 300.000   |
|   | (3) Anggota                                                   | Orang/Paket   | 250.000   |

| 1 | 2                                                      | 3              | 4         |
|---|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|   | b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber                       | Orang/Paket    | 600.000   |
|   | 3) Nilai lebih dari Rp. 100 juta                       |                |           |
|   | a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)                        |                |           |
|   | (1) Ketua                                              | Orang/Paket    | 650.000   |
|   | (2) Sekretaris                                         | Orang/Paket    | 500.000   |
|   | (3) Anggota                                            | Orang/Paket    | 400.000   |
|   | b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber                       |                | 1.000.000 |
|   | b. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan non konstruksi |                |           |
|   | 1) Nilai Rp. 5 juta s.d 50 juta:                       |                |           |
|   | a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)                        |                |           |
|   | (1) Ketua                                              | Orang/Paket    | 150.000   |
|   | (2) Sekretaris                                         | Orang/Paket    | 125.000   |
|   | (3) Anggota                                            | Orang/Paket    | 100.000   |
|   | b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber                       | Orang/Paket    | 125.000   |
|   | 2) Nilai lebih dari Rp. 50 juta s.d 100 juta           |                |           |
|   | a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)                        |                |           |
|   | (1) Ketua                                              | Orang/Paket    | 350.000   |
|   | (2) Sekretaris                                         | Orang/Paket    | 300.000   |
|   | (3) Anggota                                            | Orang/Paket    | 250.000   |
|   | b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber                       | Orang/Paket    | 300.000   |
|   | 3) Nilai lebih dari Rp. 100 juta                       |                |           |
|   | a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)                        |                |           |
|   | (1) Ketua                                              | Orang/Paket    | 500.000   |
|   | (2) Sekretaris                                         | Orang/Paket    | 450.000   |
|   | (3) Anggota                                            | Orang/Paket    | 350.000   |
|   | b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber                       | Orang/Paket    | 450.000   |
| 6 | Honorarium Pengelola Aset Desa                         |                |           |
|   | a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa            | Orang/Bulan    | 350.000   |
|   | b. Pembantu Pengelola Aset Desa                        | Orang/Bulan    | 300.000   |
|   | c. Petugas/Pengurus Aset Desa                          | Orang/Bulan    | 250.000   |
| 7 | Honorarium Pembicara Khusus Keagamaan                  |                |           |
|   | a. reputasi Provinsi/Nasional                          | Orang/Kegiatan | 1,500.000 |
|   | b. reputasi Kabupaten                                  | Orang/Kegiatan | 1.000.000 |
|   | c. reputasi Kecamatan                                  | Orang/Kegiatan | 500.000   |

| 1  | 2                                                                                                                                         | 3              | 4                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|    | d. reputasi Desa                                                                                                                          | Orang/Kegiatan | 300.000               |
| 8  | Honorarium Rohaniwan                                                                                                                      | Orang/Kegiatan | 100.000               |
| 9  | Honorarium Pembaca Doa                                                                                                                    | Orang/Kegiatan | 100.000               |
| 10 | Honorarium Sopir Ambulans                                                                                                                 | Orang/Bulan    | 1.000.000             |
| 11 | Honorarium Tim atau Panitia Fasilitas Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ditetapkan Maksimal 50% dari Biaya Operasional Sesuai Perhitungan KJPP |                |                       |
|    | a. Tim Kabupaten                                                                                                                          |                |                       |
|    | 1) Penanggung jawab                                                                                                                       | Orang/Paket    | 8% x (50% BO)         |
|    | 2) Wakil Penanggung jawab                                                                                                                 | Orang/Paket    | 6% x (50% BO)         |
|    | 3) Ketua                                                                                                                                  | Orang/Paket    | 5% x (50% BO)         |
|    | 4) Wakil Ketua                                                                                                                            | Orang/Paket    | 5% x (50% BO)         |
|    | 5) Sekretaris                                                                                                                             | Orang/Paket    | 4% x (50% BO)         |
|    | 6) Anggota (6 orang)                                                                                                                      | Orang/Paket    | 12% x (50% BO) :<br>6 |
|    | b. Tim Desa                                                                                                                               |                |                       |
|    | 1) Penanggung jawab                                                                                                                       | Orang/Paket    | 8% x (50% BO)         |
|    | 2) Ketua                                                                                                                                  | Orang/Paket    | 7% x (50% BO)         |
|    | 3) Wakil Ketua                                                                                                                            | Orang/Paket    | 6% x (50% BO)         |
|    | 4) Sekretaris                                                                                                                             | Orang/Paket    | 6% x (50% BO)         |
|    | 5) Anggota merangkap verifikator (unsur Pemerintah Provinsi)                                                                              | Orang/Paket    | 6% x (50% BO)         |
|    | 6) Anggota merangkap verifikator (unsur Pemerintah Kabupaten)                                                                             | Orang/Paket    | 6% x (50% BO)         |
|    | 7) Anggota merangkap verifikator (unsur Kecamatan)                                                                                        | Orang/Paket    | 5% x (50% BO)         |
|    | 8) Anggota (4 orang)                                                                                                                      | Orang/Paket    | 16% x (50% BO) :<br>4 |
| 12 | Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa                                                                                                  |                |                       |
|    | a. Ketua Panitia                                                                                                                          | Orang/Bulan    | 1.000.000             |
|    | b. Sekretaris                                                                                                                             | Orang/Bulan    | 800.000               |
|    | c. Seksi Pendaftaran Pemilih                                                                                                              |                |                       |
|    | 1) Ketua                                                                                                                                  | Orang/Paket    | 1.500.000             |
|    | 2) Anggota (2 orang)                                                                                                                      | Orang/Paket    | 1.000.000             |
| 13 | Honorarium Operator                                                                                                                       | Orang/Bulan    | 250.000,00            |
| 14 | Insentif Kader Desa yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan trantibumlinmas.           | Orang/Bulan    | 50.000,00             |

C. STANDAR HARGA SATUAN HARGA UANG SAKU

| NO | URAIAN    | SATUAN     | HARGA (Rp) |
|----|-----------|------------|------------|
| 1  | 2         | 3          | 4          |
| 1  | Uang saku | Orang/Hari | 60.000     |

D. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LEMBUR

| NO | URAIAN                                    | SATUAN         | HARGA (Rp) |
|----|-------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                         | 3              | 4          |
| 1  | Uang lembur Kepala Desa                   | Orang/Jam      | 11.000     |
| 2  | Uang lembur Sekretaris Desa               | Orang/Jam      | 10.000     |
| 3  | Uang lembur Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa | Orang/Jam      | 9.000      |
| 4  | Uang lembur                               | Orang/Kegiatan | 25.500     |

E. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN SELEKSI PERANGKAT DESA

| NO | URAIAN                                                                                                                                          | SATUAN         | HARGA (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                               | 3              | 4          |
| 1  | Biaya fasilitasi ujian tertulis Perangkat Desa oleh tim seleksi/camat/perangkat daerah yang membidangi:                                         |                |            |
|    | a. Penyusunan naskah soal ujian per formasi                                                                                                     | Paket          | 750.000    |
|    | b. Fasilitator ujian                                                                                                                            | Orang/Hari     | 400.000    |
| 2  | Pengawas ujian tertulis oleh Tim Pemantau Kecamatan                                                                                             | Orang/Kegiatan | 150.000    |
| 3  | Biaya fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis oleh perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia | Paket          | 10.000.000 |

F. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN/DIKLAT/BIMTEK

| NO | URAIAN                                     | SATUAN     | HARGA (Rp)   |
|----|--------------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 2                                          | 3          | 4            |
| 1  | Pengiriman peserta pelatihan/diklat/bimtek | Orang/Kali | 3.500.000,00 |

G. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

| NO | URAIAN                         | SATUAN     | HARGA (Rp)   |
|----|--------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 2                              | 3          | 4            |
| 1  | Iuran Asosiasi Pemerintah Desa | Desa/Tahun | 9.000.000,00 |
| 2  | Iuran Asosiasi BPD             | Desa/Tahun | 2.000.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DESA

Bentuk Pertanggungjawaban dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pertanggungjawaban yang disusun secara benar, lengkap, dan sah, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Honorarium/Uang Sidang meliputi:
  - a. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim;
  - b. Surat Undangan;
  - c. Daftar Hadir;
  - d. Notulen Sidang;
  - e. Daftar Penerimaan Uang Disertai Potongan Pajak; dan
  - f. Bukti Setoran Pajak Dengan Pph 21 Sebesar 5%.
2. Uang Lembur meliputi:
  - a. Surat Perintah Lembur;
  - b. Daftar Hadir Atau Absen Datang dan Pulang Lembur;
  - c. Laporan Hasil Lembur;
  - d. Daftar Penerimaan Uang Disertai Potongan Pajak;
  - e. Bukti Setoran Pajak Dengan Pph Sebesar 5%; dan
  - f. Foto Kegiatan.
3. Uang Makan Lembur meliputi:
  - a. Surat Perintah Lembur;
  - b. Daftar Hadir Atau Absen Datang dan Pulang Lembur;
  - c. Laporan Hasil Lembur;
  - d. Daftar Penerimaan Uang Disertai Potongan Pajak;
  - e. Bukti Setoran Pajak Dengan Pph Sebesar 5%; dan
  - f. Foto Kegiatan.
4. Belanja Makan dan Minum Rapat meliputi:
  - a. Surat Undangan;
  - b. Daftar Hadir Rapat;
  - c. Bukti Setor Pajak;
  - d. Notulen Rapat; dan
  - e. Nota Pembelian Konsumsi dan Kwitansi Pembayaran.
5. Belanja Makan Minum Tamu;
  - a. Surat Undangan Penerimaan Tamu;
  - b. Daftar Hadir Tamu;
  - c. Notulen Rapat/Acara Tamu;
  - d. Bukti Setor Pajak Dengan Pph Sebesar 2% serta Lampiran Pajak Daerah Sebesar 10%;
  - e. Nota Pembelian Konsumsi; dan
  - f. Kwitansi Pembayaran.
6. Belanja Alat Tulis Kantor meliputi:
  - a. Nota Pembelian;
  - b. Bukti setoran pajak dengan PPn sebesar 11% dikenakan pengadaan barang dan jasa di atas Rp2.000.000,00; dan
  - c. Kwitansi pembayaran dengan Pph 22 sebesar 1,5% yang dikenakan atas pengadaan barang di atas Rp2.000.000,00.
7. Belanja Cetak dan Penggandaan meliputi:
  - a. Nota Pembelian;
  - b. Bukti setoran pajak dengan Ppn sebesar 11% dikenakan pengadaan barang dan jasa di atas Rp2.000.000,00;

- c. Kwitansi pembayaran dengan PPh 22 Sebesar 1,5% dikenakan atas pengadaan barang di atas Rp2.000.000,00; dan
  - d. Foto khusus untuk pengadaan banner.
8. Belanja Bahan/Materi Alat Bangunan, Pupuk, dan Bibit meliputi:
- a. Nota Pembelian Disertai Spesifikasi Teknis;
  - b. Bukti setoran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) PPn sebesar 11% dikenakan atas Pengadaan Barang Dan Jasa di atas Rp2.000.000,00;
    - 2) PPh 22 sebesar 1,5% dikenakan atas Pengadaan Barang di atas Rp2.000.000,00;
    - 3) Untuk barang hasil alam seperti pasir, bambu, batu kali (Golongan C) hanya dikenakan pajak daerah, kecuali pembelian dari toko dikenakan PPn Dan PPh 22 tanpa pajak daerah; dan
    - 4) PPn Dan PPh dikecualikan bagi pembelian pupuk, bibit dan lain-lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
  - c. Kwitansi Pembayaran.
9. Pengadaan Barang Jasa/Modal Melalui Jasa Pihak Ketiga meliputi:
- a. Nota/Surat Pesanan/SPK;
  - b. Bukti Setoran Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) PPn sebesar 11% dikenakan pengadaan barang dan jasa di atas Rp2.000.000,00;
    - 2) PPh 22 sebesar 1,5% dikenakan atas pengadaan barang di atas Rp2.000.000,00; dan
    - 3) Untuk pengadaan jasa dikenakan PPh 23 sebesar 2%.
  - c. Kwitansi; dan
  - d. Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis.
10. Undangan/Surat Penawaran meliputi:
- a. Surat Tugas Dan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
  - b. Tanda Terima Uang/Bukti Pembayaran; dan
  - c. Laporan yang ditandatangani oleh pelaksana tugas.
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- a. Undangan Disposisi yang melatarbelakangi pelaksanaan perjalanan dinas;
  - b. Surat Tugas yang ditandatangani oleh yang memberi perintah;
  - c. Surat Perjalanan Dinas (SPD);
  - d. Bukti Penerimaan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
  - d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
12. Undangan/Disposisi
- a. Surat Tugas;
  - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD);
  - c. Bukti Penerimaan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
  - d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
  - e. Bukti Transport/Nota BBM; dan
  - f. Bukti Penginapan.
13. Uang Transport Dalam Rangka Sosialisasi/Bimbingan Teknis
- a. Kelengkapan Penyelenggaran meliputi:
    - 1) Undangan;
    - 2) Tanda Terima Uang;
    - 3) Daftar Hadir;
    - 4) Bukti Setoran Pajak; dan
    - 5) Laporan Yang Ditandatangani Oleh Ketua Pelaksana/Penyelenggara.
  - b. Kelengkapan Peserta meliputi:
    - 1) Undangan;
    - 2) Tanda Terima Uang;
    - 3) Bukti Setoran Pajak; dan
    - 4) Laporan yang ditandatangani oleh yang ditugaskan.

#### 14. Pembayaran Sewa

- a. Kwitansi Pembayaran seperti sewa *soundsystem*, tratag, meja/kursi, sewa kendaraan, dan lain-lain/tanpa batas minimal, dikenakan PPh 23 tarif 2% untuk penyedia jasa ber NPWP atau 4% untuk penyedia jasa tidak ber NPWP dan atau PPn tarif 10% untuk nilai sewa diatas Rp1.000.000,00; dan
- b. Bukti setoran pajak, sewa gedung/tanah/bangunan, dikenakan PPh pasal 4 (2) tarif 10% dari Daftar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPn tarif 10% untuk nilai kontrak diatas Rp1.000.000,00

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003